

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Muhammad Munar Mukhsin^{1*}, Chenny Seftarita², Riswandi³, Talbani Farlian⁴,
Anita Faiziah⁵

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- 3) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- 4) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
- 5) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

munar19@mhs.unsyiah.ac.id chenny@usk.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implications of the allocation of special autonomy fund budgets during the period of 2008-2021 towards critical sectors, namely education, health, and infrastructure, as well as its impact on poverty mitigation in the province of Aceh. This research was conducted within the region of Aceh and employed a multiple linear regression analysis method that integrates time series and cross-sectional data models. Data processing was conducted utilizing the Eviews 12 software. Empirical findings from this research affirm that the allocation of special autonomy funds directed towards the education and infrastructure sectors contributes positively and significantly to addressing poverty levels within the area. However, a similar allocation intended for the health sector demonstrates a significant and negative impact on poverty-related concerns. These findings carry implications that, in an isolated framework, the allocation of special autonomy funds across these three sectors substantially plays a role in supporting efforts to reduce poverty rates in the province of Aceh.

Keywords: Poverty, Budget Allocation, Special Autonomy Fund

Abstrak

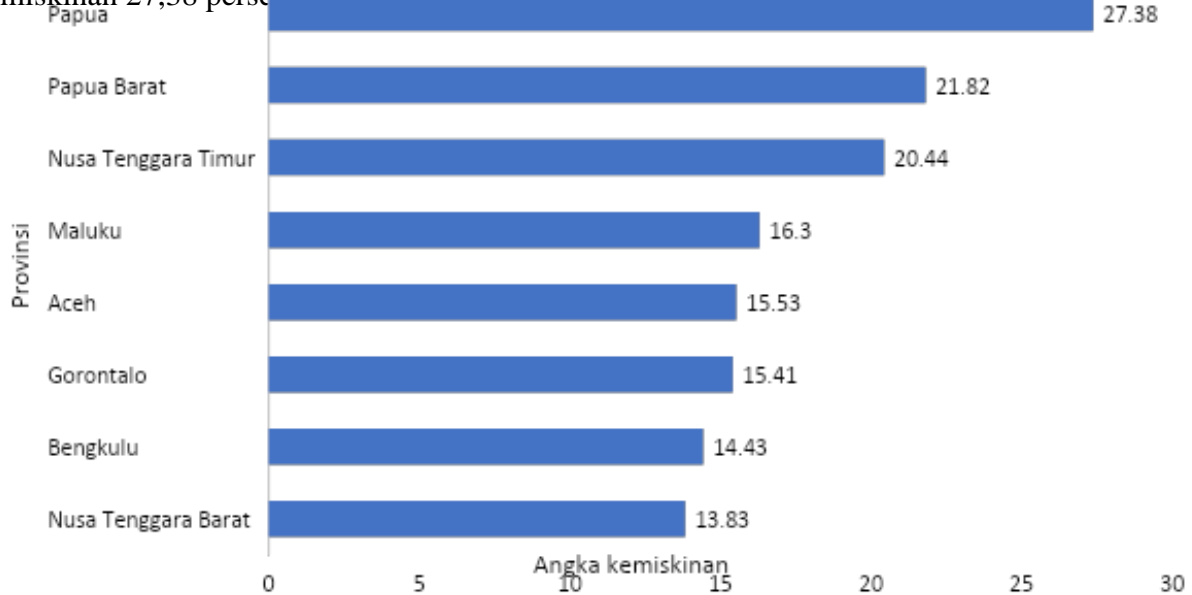
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari alokasi anggaran dana otonomi khusus selama periode 2008-2021 terhadap sektor-sektor vital, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dampaknya terhadap mitigasi kemiskinan di wilayah Provinsi Aceh. Riset ini dilaksanakan di Provinsi Aceh dan menerapkan metode analisis regresi data linier berganda yang menggabungkan model data time series dan cross section. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian empiris menegaskan bahwa alokasi anggaran dana otonomi khusus yang ditujukan bagi sektor pendidikan dan infrastruktur memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap penanggulangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, alokasi dana serupa yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan justru menunjukkan dampak yang negatif dan signifikan terhadap isu kemiskinan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa dalam kerangka terpisah, alokasi dana otonomi khusus pada ketiga sektor tersebut secara substansial berperan dalam mendukung upaya mereduksi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata kunci: Kemiskinan, Alokasi Anggaran, Dana Otonomi Khusus

1. PENDAHULUAN

Tantangan kemiskinan meresap ke berbagai lapisan masyarakat di berbagai negara, merentang lintas bangsa. Dalam konteks ini, seseorang dianggap mengalami kemiskinan jika pendapatan yang diperoleh rendah, tingkat pendidikannya terbatas, produktivitas kerjanya rendah, kondisi kesehatan serta gizinya buruk, dan tingkat kesejahteraannya rendah (Sa'diyah, 2012). Provinsi Aceh di Pulau Sumatera menempati peringkat pertama dalam kontribusi kemiskinan,

dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,53 persen. Secara nasional, Provinsi Aceh menduduki peringkat keenam dalam hal tingkat kemiskinan, Diatas dari Provinsi Gorontalo dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,41. Provinsi Papua menempati klasemen tertinggi dengan angka kemiskinan 27,38 persen (Badan Pusat Statistik 2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Gambar 1. Kondisi Kemsikinan Aceh Di Sumatera Tahun 2021

Indikator-indikator seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, menjadi topik pembicaraan yang menarik perhatian. Jika dilihat dari segi metrik ini, situasi di Indonesia masih belum mencapai tingkat stabilitas yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang masih menjadi tantangan, termasuk ketidakmerataan distribusi dalam sektor pendidikan dan kesehatan (Nadila Wulan Cahyani, 2019).

Fungsi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui pengeluaran publik sangat penting. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal adalah ciri khas kemiskinan yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Karena itu, peran pemerintah memiliki relevansi yang besar dalam mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan yang sesuai, penggunaan anggaran yang efektif, serta langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif demi mencapai kesejahteraan yang lebih merata (Mardiana, 2018).

Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, pemerintah terus berusaha mengatasi permasalahan ini. Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan dan program nasional dan daerah yang diimplementasikan secara teratur, terencana, dan berkolaborasi dengan sektor usaha dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Provinsi Aceh memperoleh manfaat berupa Dana Otonomi Khusus Aceh (OTSUS), selain menerima transfer dana dari pemerintah pusat seperti provinsi-provinsi lainnya.

BPKA (2022) jumlah keseluruhan alokasi dana OTSUS Provinsi Aceh mencapai 19,17 persen dari total keseluruhan dana OTSUS Provinsi Aceh untuk sektor pendidikan dari tahun 2008 hingga 2021, 13,40 persen untuk sektor kesehatan, dan 44,10 persen untuk sektor infrastruktur. Jumlah total anggaran dana OTSUS Provinsi Aceh dari tahun 2008 hingga tahun 2021 mencapai Rp 83.504.744.145.482.

Tabel 1. Total Alokasi Anggaran Dana OTSUS Provinsi Aceh Tahun 2008 Sampai Dengan 2021 (Miliar Rupiah) Berdasarkan UU No. 11/2006 dan Qanun No.2/2008

Tahun	BIDANG							Total
	INFRASTRUKTUR	PEMBERDAYAAN EKONOMI	PENGENTASAN KEMISKINAN	PENDIDIKAN	SOSIAL	KESEHATAN	KEISTIMEWAAN ACEH	
2008	1.901	860	12	418	66	171	162	3.590
2009	2.399	466	4	267	107	440	46	3.729
2010	1.982	1.108	64	371	17	290	18	3.850
2011	2.524	621	501	33	59	401	372	4.511
2012	1.565	987	610	1.357	159	667	132	5.477
2013	2.836	938	953	764	131	560	41	6.223
2014	3.521	549	166	1.570	166	807	46	6.825
2015	3.206	778	169	1.684	214	893	113	7.057
2016	3.678	992	210	1.582	117	967	161	7.707
2017	2.867	942	412	2.014	215	1.280	241	7.971
2018	3.683	836	462	1.624	177	1.179	67	8.028
2019	3.169	751	859	2.184	104	1.142	149	8.358
2020	2.574	441	518	1.431	1.052	1.418	118	7.552
2021	3.097	460	241	1.656	297	1.632	169	7.552
JUMLAH	39.002	10.729	5.181	16.955	2.881	11.847	1.835	88.430
%	44,10	12,13	5,86	19,17	3,26	13,40	2,08	100,00

Sumber: BPKA, 2022

Pemberian dana OTSUS untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Keistimewaan otonomi Aceh diyakini mampu mempercepat penyebaran manfaat jika diiringi oleh tata kelola pemerintahan yang efektif. Keterlibatan yang lebih dekat antara pemerintah daerah dan penduduknya daripada dengan pemerintah pusat seharusnya memberikan informasi yang lebih tepat dan memungkinkan penanganan masalah dengan lebih responsif. Dengan demikian, otonomi khusus Aceh diharapkan akan meningkatkan efisiensi dalam distribusi sumber daya (Ikhsan & Pribadi, 2015).

Hidayat & Azhar (2022) alokasi dana OTSUS dalam bentuk desentralisasi untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Keistimewaan otonomi Aceh diyakini memiliki potensi untuk lebih cepat menyebarkan manfaat pemberdayaan ekonomi jika didukung oleh administrasi pemerintahan yang baik. Karena pemerintah daerah memiliki interaksi yang lebih dekat dengan penduduk daripada pemerintah pusat, penting bagi mereka untuk memiliki informasi yang akurat dan dapat merespons masalah dengan cepat. Oleh karena itu, otonomi khusus Aceh diperkirakan akan meningkatkan efisiensi dalam distribusi sumber daya

2. TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Anggaran adalah hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang mewakili total jumlah dana yang tersedia selama satu tahun. Fungsi anggaran meliputi perhitungan pengeluaran, mendukung keputusan dalam perencanaan pembangunan, analisis pengeluaran mendatang, serta berperan sebagai sumber pengembangan untuk penilaian kinerja. Ketika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara berbagai permintaan dari berbagai sektor, alokasi anggaran dapat dianggap berhasil efektif (Indra Bastian, 2001).

Penganggaran mencerminkan hasil dari perencanaan strategis, formulasi, dan strategi yang telah disusun. Karena kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan dan kurangnya fokus dalam pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan, tahap penganggaran menjadi sangat signifikan. Penganggaran merupakan pendekatan manajerial yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi dengan lebih teratur dan efektif (Mardiasmo, 2004).

Desentralisasi

Wibowo (2014) desentralisasi fiskal juga dapat dilihat sebagai suatu inisiatif pemindahan dana dari entitas pemerintah yang bertingkat lebih tinggi menuju entitas yang lebih bawah, dengan tujuan utama untuk memastikan keberlangsungan fungsi dan tanggung jawab pemerintah dan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan batasan wewenang yang telah dirumuskan.

Desentralisasi fiskal adalah untuk memastikan pemenuhan harapan wilayah dalam mengurus urusan keuangan negara, mendorong tanggung jawab dan keterbukaan dalam tindakan pemerintah daerah, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal, mengurangi perbedaan regional, menjamin penyediaan minimal layanan publik di setiap daerah, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduk (Nurhemi, 2015).

Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Dana otonomi khusus adalah pendanaan yang bersumber dari APBN, ditujukan untuk mendukung realisasi otonomi istimewa di sebuah daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Istimewa untuk Papua. UU ini mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang merujuk pada Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, terkait perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh (Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Kemiskinan

Limberg & Godwin (2007) pendapat ini mengindikasikan bahwa kemiskinan diartikan sebagai kekurangan dalam mencapai kesejahteraan, dan sebaliknya, kesejahteraan diartikan sebagai ketiadaan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan diinterpretasikan sebagai penurunan tingkat kesejahteraan. Sebagai contoh, jika suatu masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, maka masyarakat tersebut dianggap miskin. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi, maka keadaan mereka ditandai oleh kemakmuran, kebahagiaan, dan kepuasan (Albornoz, 2007).

Todaro (2006) mengamati adanya keterkaitan yang erat antara kemiskinan dan keterbelakangan, yang melibatkan berbagai aspek ekonomi dan non-ekonomi. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab keterbelakangan dan kemiskinan, yakni rendahnya taraf hidup, kurangnya kepercayaan diri, dan pembatasan kebebasan. Ketiga faktor ini memiliki hubungan timbal balik yang kompleks. Rendahnya taraf hidup terkait dengan rendahnya produktivitas kerja, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang melonjak, dan keterbatasan investasi per kapita. Aspek non-ekonomi juga memainkan peran signifikan, seperti rendahnya rasa percaya diri dan pembatasan kebebasan. Interaksi antara faktor-faktor ini membentuk gambaran yang kompleks mengenai keterbelakangan dan kemiskinan. Untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan produktivitas, pengurangan angka pengangguran, peningkatan investasi, serta upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, guna memperkuat potensi sumber daya manusia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan kurang sejahtera yang diukur dalam jumlah Rupiah (Rp) per kapita per bulan. Di sisi lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dijadikan patokan untuk mendefinisikan kemiskinan, yang mengacu pada

kondisi akibat kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah selama satu bulan, termasuk jumlah kalori, protein, vitamin, dan mineral lain yang diperlukan untuk hidup yang layak. Kebutuhan konsumsi minimal ini harus memenuhi standar 1200 kalori per hari untuk kelompok makanan, ditambah dengan kebutuhan lain seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.

Pada penelitian ini, Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Provinsi Aceh tahun 2008-2021 dialokasikan pada sektor anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, dan anggaran infrastruktur secara bersama-sama dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder yang terdiri dari data panel, yang berperan sebagai penghubung antara data runtut waktu (time series) dan data cross section (individual). Data time series yang diambil untuk analisis mencakup 23 Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Aceh, dengan rentang waktu dari tahun 2008 hingga 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jumlah alokasi anggaran dana OTSUS Provinsi Aceh di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta data kemiskinan. Seluruh data berasal dari sumber yang terpercaya, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel untuk mengevaluasi hubungan dan pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan ini. Jika model tersebut diubah untuk studi ini, maka:

$$K_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Analisis data panel regresi melibatkan proses analisis data numerik yang dapat disusun dengan bantuan metode statistika. Pada kasus ini, model memiliki tiga variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga dapat dinyatakan sebagai:

$$K_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 AP_{it} + \beta_2 AK_{it} + \beta_3 AI_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

- K = Kemiskinan
- i = Kabupaten/Kota

t = Tahun

α = Nilai Konstanta

β = Koefisien

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari setiap variabel bebas

AP = Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

AK = Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

AI = Anggaran Infrastruktur Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

e = Standar error (*error term*)

Definisi operasional variabel kemiskinan yaitu Rasio jumlah penduduk miskin dibagi dengan total penduduk pada tahun 2008-2021. Alokasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam rupiah dalam periode tahun 2008 sampai 2021 yang di peruntukan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infratraktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*, *Common Effect Model*, dan *Random Effect Model*

Variable	CEM		FEM		REM	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	-589.9611	0.0000	87.47314	0.0000	85.78224	0.0000
AP	5424.779	0.0009	530.5648	0.0070	537.1643	0.0069
AK	-22139.82	0.0009	-2181.546	0.0069	-2208.306	0.0069
AI	16742.41	0.0009	1648.870	0.0070	1669.105	0.0069

Sumber: Hasil Penelitian Olahan Eviews 10 (2023)

Tabel 2. mencakup hasil pengujian dari tiga model yang diterapkan pada regresi data panel. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis guna menentukan model yang paling sesuai untuk penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1049.755465	(22,296)	0.0000
Cross-section Chi-square	1407.053357	22	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian Olahan Eviews 10 (2023)

Hasil uji F pada Tabel 3. menunjukkan nilai F-statistik sebesar 1049,755465 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas $< \alpha$ 0,05, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih sesuai untuk digunakan dari pada *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	2	1.0000

Sumber: Hasil Penelitian Olahan Eviews 10 (2023)

Dari hasil estimasi pada Tabel 4, mengindikasikan bahwa nilai Statistik Chi-Sq adalah 0,000000 dengan probabilitas cross section random sekitar $1,000 > \alpha 0,05$. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa model yang lebih sesuai digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 5. Uji Hausman

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1665.923 (0.0000)	0.041905 (0.8378)	1665.964 (0.0000)

Sumber: Hasil Penelitian Olahan Eviews 10 (2023)

Dari Tabel 5, terlihat bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan pada keduanya adalah 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut berada di bawah 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pilihan estimasi dari hasil uji LM adalah *Fixed Effects Model* (FEM)

Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 6. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87.47314	17.04632	5.131498	0.0000
AP	530.5648	195.4846	2.714100	0.0070
AK	-2181.546	802.3563	-2.718924	0.0069
AI	1648.870	606.9559	2.716623	0.0070

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.989296	Mean dependent var	37.46618	
Adjusted R-squared	0.988391	S.D. dependent var	26.36459	
S.E. of regression	2.840594	Akaike info criterion	5.003202	
Sum squared resid	2388.416	Schwarz criterion	5.307979	
Log likelihood	-779.5155	Hannan-Quinn criter.	5.124879	
F-statistic	1094.245	Durbin-Watson stat	0.642849	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Penelitian Olahan Eviews 10 (2023)

Dari Tabel 6, kita dapat menginterpretasikan hasil dari persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$K_{it} = 87,47 + 530,56AP_{it} - 2181,54AK_{it} + 1648,87AI_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots (4.1)$$

Nilai koefisien variabel pendidikan 530.5648 dan probabilitas sebesar $0.0000 > 0,05$, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran dana otonomi khusus pada sektor pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2008 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa langkah meningkatkan alokasi anggaran dana otonomi khusus pada sektor pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa penganggaran dana OTSUS pada sektor pendidikan yang pada

penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Mantsani et al., (2020).

Nilai koefisien variabel pendidikan -2181.546 dan probabilitas sebesar $0.0070 > 0,05$, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran dana otonomi khusus pada sektor kesehatan terbukti memiliki pengaruh signifikan yang bersifat negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2008 hingga 2021. Penemuan ini mengungkap bahwa peningkatan alokasi anggaran dana otonomi khusus pada sektor kesehatan berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Muhammad et al., (2019) dan Sari (2018) mengungkapkan bahwa pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Nilai koefisien variabel pendidikan 1648.870 dan probabilitas sebesar $0.0070 > 0,05$, temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengalokasian dana otonomi khusus pada sektor infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2008 hingga 2021. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran dana otonomi khusus pada sektor infrastruktur berkontribusi positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Wibowo (2018) mengungkapkan bahwa pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kemiskinan.

Probabilitas F-statistik adalah 0,000000, nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas, termasuk alokasi anggaran dana otonomi khusus sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Nilai koefisien R^2 sebesar 0,989296 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (anggaran dana otonomi khusus sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) memiliki pengaruh besar terhadap variabel terikat (kemiskinan) sebesar 98,9296 persen. Sisanya sebesar 1,0704 persen dipengaruhi oleh faktor lain dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak dari alokasi dana Otsus Provinsi Aceh terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menyelidiki Pengaruh Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Anggaran dana OTSUS sektor pendidikan sebagai salah satu faktor yang menentukan kesuksesan Provinsi Aceh dalam mengentaskan kemiskinan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan alokasi dana OTSUS sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa penganggaran dana OTSUS pada sektor pendidikan yang pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Alokasi dana OTSUS sektor kesehatan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan Provinsi Aceh dalam mengatasi kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana OTSUS sektor kesehatan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana OTSUS pada sektor kesehatan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan.

Alokasi dana OTSUS sektor kesehatan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan Provinsi Aceh dalam mengatasi kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana OTSUS sektor kesehatan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana OTSUS pada sektor kesehatan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang signifikan ke sektor kesehatan memiliki dampak positif yang besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Sebaliknya, alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan infrastruktur justru dapat memperparah situasi kemiskinan. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran ke sektor kesehatan sebagai strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di sektor pendidikan dan infrastruktur. Hal ini penting bagi para pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait di Provinsi Aceh untuk membuat keputusan yang lebih efektif dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albornoz, b., chayot, cronkleton, jon, Evans, & W. (2007). *Menuju kesejahteraan dalam masyarakat hutan, buku pedoman untuk pemerintah*. Cifor.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved January 14, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022, March 22). <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta BPFE.
- BPKA. (2022). *Laporan Keuangan Aceh 2021*. Badan Pemeriksa Keuangan Aceh (BPKA).
- Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK-DIY). (2021). <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/dana-transfer/dok,-did-dan-dk-diy.html>
- Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65–74.
- Ikhsan, I., & Pribadi, U. (2015). Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0027>
- Limberg, M, G. C., & G. (2007). *Menuju Kesejahteraan Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat*. Cifor.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2437>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (2nd ed.). Andi Yogyakarta.
- Nadila Wulan Cahyani. (2019, October 17). *Wajib Turunkan Kemiskinan, Tetap Tingkatkan Kesejahteraan - ITS News*. ITS News. <https://www.its.ac.id/news/2019/10/17/wajib-turunkan-kemiskinan-tetap-tingkatkan-kesejahteraan/>

Nurhemi, G. S. (2015). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 183–206.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Issue 184, pp. 1–27). (2014).

Sa'diyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal Of Economis*, 1(1), 1–11.

Todaro. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Wibowo, mohamad erhan. (2014). Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*, 1–85(1), 1–85.